WACANA KENAIKAN UPAH MINIMUM DI SKH BISNIS INDONESIA

(Analisis Wacana Kritis Van Djik Mengenai Pemberitaan Polemik Kenaikan Upah Buruh di SKH Bisnis Indonesia Edisi November 2012)

Denita¹, Bonaventura Satya Bharata²

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta Jl. Babarsari No. 6 Yogyakarta Email: matondangdenita@gmail.com

ABSTRAK

Upah merupakan komponen utama buruh dalam menopang kehidupan seharihari. Untuk melindungi buruh pemerintah mengeluarkan kebijakan upah minimum. Terkait pemberitaan upah minimum ini selalu terdapat konflik antara buruh dan pengusaha. Pengusaha selalu keberatan dan buruh tidak pernah puas akan besaran jumlah upah minimum yang ditetapkan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metoode analisis wacana Teun A. Van Dijk dengan tujuan untuk melihat bagaimana wacana dominan teks pemberitaan polemik kenaikan upah minimum tahun 2013 di SKH Bisnis Indonesia, diproduksi, dan diolah oleh wartawan menjadi sebuah berita utuh. Penelitian ini mengunakan tiga level unit analisis yakni level teks, kognisi sosial dan analisis sosial. Ketiga level tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain untuk menjelaskan bagaimana teks diproduksi melalui representasi kognisi sosial wartawan dan kemudian disebarkan serta dilegimitasi ke tengah masyarakat.

Hasil temuan, pada level teks memperlihatkan bahwa berita informasi atau defenisi polemik kenaikan upah minimum tahun 2013 sebagain besar berasal dari perspektif pengusaha, dibandingkan buruh. penggunaan diksi seperti *daya saing, iklim investasi, situasi perekonomian* menunjukkan benang merah terhadap pemberitaan polemik kenaikan upah minimum tahun 2013 yang diangkat SKH Bisnis Indonesia. Pada level kognisi sosial, wartawan menggunakan skema peristiwa yang tajam dalam memahmi peristiwa kenaikan upah minimum tahun 2013. Terakhir, pada level analisis sosial menunjukkan kekuasaan dan akses yang dimiliki masing-masing pelibat wacana untuk mengembangkan wacana, diproduksi media massa dan dilegimitasi di tengah masyarakat.

Kata kunci: upah minimum, SKH Bisnis Indonesia, Teun A. van Dijk, analisis wacana dominan

1. Latar Belakang

Persoalan upah buruh merupakan topik penting dibahas karena upah adalah komponen utama bagi buruh dalam menopang kehidupan mereka sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, penentuan besaran jumlah upah di Indonesia biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara buruh dan pihak perusahaan. Namun untuk melindungi pekerja/buruh terhadap ketidak-adilan upah pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 88 ayat 2 dan pasal 89 ayat 1 yang mengatur tentang kebijakan upah minimum. Tujuan ditetapkannya upah minimum tersebut agar pihak pengusaha tidak membayarkan upah yang lebih rendah dari besaran upah minimum yang ditetapkan. Faktanya masih terdapat beberapa perusahaan di Indonesia yang membayar upah lebih rendah dari besaran upah minimum yang sudah ditetapkan.

Terkait penentuan jumlah besaran upah minimum ini, peneliti mengamati terdapat konflik kontroversial antara buruh dan pengusaha disejumlah pemberitaan di media massa. Pihak pengusaha diwakili oleh Asosiasi Pengusaha (Apindo) dan buruh diwakili oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pihak pengusaha kerap kali keberatan akan besaran jumlah upah minimum yang ditetapkan. Misalnya, dalam penetapan UMP DKI Jakarta 2013 sebesar Rp2,2 juta dinilai contoh kebijakan yang mengedepankan popularitas pengambil kebijakan, tanpa mempertimbangkan keberlangsungan usaha. Menariknya, masalah kenaikan upah buruh lebih sering

¹ Kepopularitasan ini berkaitan dengan Joko Widodo yang baru saja terpilih menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Lihat *SKH Bisnis Indonesia*, edisi 22 November 2012.

dikeluhkan pengusaha daripada membongkar penyebab ekonomi tinggi, seperti biaya siluman (*Invisible cost*).

Di sisi lain, pihak buruh/pekerja tidak pernah merasa mendapatkan upah layak dikarenakan ketidak-mampuan buruh dalam mencukupi kehidupan sehari-hari yang semakin bertambah dan harga kebutuhan yang terus menaik. Presiden Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KBSI) Mudkofir, mengatakan sikap penolakan kenaikan upah minimum di provinsi, kabupaten dan kota merupakan suatu upaya menjalankan upah murah tapi ingin produktivitas yang tinggi. Akibatnya, buruh turun ke jalan menuntut kenaikan upah. Buruh menuntut kesejahteraan. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pelindung dinilai juga tidak pernah tegas dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan terutama soal pengupahan. Berbagai peraturan yang dikeluarkan atau Undang-undang ketenagakerjaan juga belum memihak kepentingan buruh.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk menelisik lebih jauh bagaimana polemik kenaikan upah minimum ini dibangun dan pada akhirnya menjadi sebuah wacana dominan di media massa. Melalui analisis wacana kita tidak hanya mengetahui bagaimana teks berita, tetapi juga bagaimana pesan itu disampaikan. Lewat kata, frasa, kalimat, metafora macam apa suatu berita disampaikan. Dengan melihat bagaimana bangunan struktur kebahasaan tersebut, analisis wacana lebih bisa melihat makna yang tersembunyi dari suatu teks. Melalui wacana, individu bukan hanya didefenisikan tetapi juga dibentuk, dikontrol dan didisplinkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis wacana van Dijk yang menekankan pada kognisi sosial sebagai pisau analisis. Analisi kognisi sosial memusatkan perhatian

pada struktur mental, proses pemaknaan, dan mental wartawan. Pendekatan kognitif ini didasarkan pada asumsi bahwa teks tidak mempunyai makna, karena makna sesungguhnya diberikan oleh pemakai bahasa, atau lebih tepatnya proses kesadaran mental dari pemakai bahasa. Berita dalam hal ini dipandang dari representasi wartawan. Pandangan, kepercayaam, stereotipe, dan kepercayaan wartawan mempengaruhi bagaimana teks berita yang dihasilkan.

Media yang digunakan ialah *SKH Bisnis Indonesia*. Hal ini dikarenakan sebagai koran pertama bersegmentasi ekonomi, *SKH Bisnis Indonesia* sendiri diterbitkan dari golongan pengusaha terkemuka di Indonesia yang berperan aktif dalam aktivitas perekonomian Indonesia. *SKH Bisnis Indonesia* di mata para pelaku bisnis, birokrat, ekonom, akademisi dan segmen pembaca lainnya diterima sebagai penyaji informasi akurat dan terpercaya (data superbrand 2007). Dengan membangun *trust* dan komitmen untuk memberikan informasi yang layak dipercaya, *SKH Bisnis Indonesia* telah menjadi pemimpin pasar (*market leader*) dalam pemberitaan bisnis dan ekonomi.² Bahkan *SKH Bisnis Indonesia* meraih *Silver Winner The Best of news Politic and Business Tabloid* Tahun 2013.³

Untuk pemilihan *time frame*, peneliti menganalisis berita *headline SKH Bisnis Indonesia* edisi November 2012. Hal ini karena setiap tanggal 1 November sesuai ketentuan penetapan upah minimum, pemerintah daerah wajib memutuskan jumlah besaran upah minimum atau sesuai instruksi Menakertrans, selambat-lambatnya pada

² http://www.bisnis.com/big-media/profile.html diakses pada tanggal 3 Oktober 2014

³http://www.solopos.com/2014/02/08/indonesia-print-media-award-bisnis-indonesia-solopos-harian-jogja-borong-penghargaan-ipma-2014-488113 diakses pada tanggal 3 oktober 2014

tanggal 20 November atau 40 hari sebelum berlakunya upah minimum, yakni pada tanggal 1 Januari 2013. Sedangkan pemilihan tahun 2012 karena upah minimum tahun 2013 ialah rata-rata kenaikan upah minimum tertinggi dalam sejarah kenaikan upah buruh di Indonesia, yakni sekitar 40 persen. Sedangkan proses penetapan upah minimum 2013 tersebut dilaksanakan pada tahun 2012.

Adapun sebagai referensi untuk penelitian mengenai upah minimum ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang revelan. Pertama, penelitian skripsi mengenai pelaksanaan upah minimum provinsi DIY bagi pekerja waktu tertentu di PT Anindya Mitra Internasional (perusahaan pemerintah daerah). Dalam penelitian skrispsi tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan upah minimum belum dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan alasan kondisi keuangan perusahaan kurang baik dan gaji pekerja didasarkan pada kualitas/produktivitas kerja. Menariknya, sebagian besar pekerja tidak mengetahui komponen upah minimum. Para pekerja hanya mengetahui bahwa gaji yang mereka terima sudah termasuk gaji pokok, gaji tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Padahal tunjangan tidak tetap tidak dapat disertakan dalam upah yang harus disesuaikan dengan upah minimum.

Sedangkan referensi untuk analisis wacana ialah penelitian skripsi oleh Noviana mengenai analisis wacana pemberitaan bencana letusan Gunung Merapi di *SKH Kedaulatan Rakyat* (KR). Dalam analisisnya, pemberitaan bencana *headline SKH KR* kebanyakan berisi proses, kronologi meletusnya Gunung Merapi dan

_

⁴ Krisnawati, Veronika Tyas. 2012. Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi DIY Bagi Pekerja Waktu Tertentu di PT Anindya Mitra Internasional. Universitas Atmajaya Yogyakarta

informasi tentang aktivitas Merapi yang semakin meningkat. Bahasa yang digunakan memang tergolong wajar, tetapi jika dianalisis dari struktur bahasanya, ada diksi yang menace pada perendahan martabat manusia. Misalnya kata 'terpanggang' yang menerangkan keadaan korban Merapi yang tewas.

Dalam tahap analisis skema wartawan, ia menemukan wartawan KR menambahkan detil pada informasi yang dirasa penting dan kuat, tetapi ada pula maksud yang diungkapkan secara tersamar, misalnya diksi "mengamuk" yang menekankan pada penyebab Merapi mengamuk atau meletus yang ditujukan kepada warga lereng sekitar Merapi yang menjadi penyebab Merapi meletus. Sementara dalam tahap analisis sosial ia menemukan dari berbagai referensi bahwa masyarakat pada umumnya menanggapi berita yang berkembang dari media, baik elektronik maupun cetak.⁵

2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wacana dominan polemik kenaikan upah minimum tahun 2013 yang dibangun di *SKH Bisnis Indonesia* pada edisi November 2012.

_

Dewi Wijayanti, Noviana. 2011. Media Cetak dan Pemberitaan Bencana Letusan Gunung Merapi: Analisis Wacana Pemberitaan Bencana Letusan Gunung Merapi Pada Headline Surat Kabar Kedaulatan Rakyat periode 27 Oktober 2010 sampai 26 november 2010). Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hal 134.

3. Hasil

Peneliti menggunakan analisis Teun van Dijk sebagai pisau analisis untuk mengetahui bagaimana polemik kenaikan upah minimum tahun 2013 yang diangkat *SKH Bisnis Indonesia*. Pisau analisis van Dijk ini menggunakan tiga unit analisis yakni level teks, kognisi sosial dan analisis sosial. Berikut penjelasan masing-masing hasil penelitian:

A. Analisis Teks

Pada level teks, peneliti menganalisis bagaimana strategi wacana yang digunakan dalam menggambarkan polemik kenaikan upah minimum. Melalui analisis teks akan terlihat bagaimana strategi yang digunakan untuk mendominasi, memarjinalkan suatu kelompok, gagasan atau peristiwa kenaikan polemik upah buruh pada teks yang bersifat eksplisit atau implisit.

Peneliti menganalisis tujuh teks berita headline edisi November 2012, yakni edisi 7 November 2012, Gejolak Buruh Ganggu Investasi, Jumlah Lembaga Kerja Sama Bipartit Sangat Kurang; Jumat, 9 November 2012, Upah buruh diusulkan Rp 2 juta, Pengusaha dan Serikat Pekerja di Bekasi Sepakat Redam Konflik; Sabtu, 10 November 2012, SBY Instruksikan Solusi Win-win, Mediasi Buruh dan Pengusaha Belum Hasilkan Kesepakatan; Kamis, 22 November 2012, Pengusaha Pasrah, Penaikan Upah Dongkrak Biaya; Jumat, 23 November 2012, Buruh Beraksi, Pasar Berspekulasi; Sabtu, 24 November 2012, UKM Bisa Penangguhan UMP; dan Rabu, 28 November 2012, Pemerintah Terkesan Lepas tangan, Tidak Ada Sektor Usaha yang Dikecualikan dari Penaikan UMP.

Berdasarkan analisis teks berita headline edisi November 2012 SKH Bisnis Indonesia Indonesia terlihat bahwa pemakaian bahasa yang digunakan SKH Bisnis Indonesia merupakan suatu bentuk praktik kekuasaan untuk memapankan wacana yang diangkat SKH Bisnis Indonesia yakni konflik pengusaha dan buruh akan besaran upah minimum tahun 2013 berdampak pada situasi iklim investasi di Indonesia. Lewat praktik pemakaian bahasa, SKH Bisnis Indonesia mencitrakan situasi perekonomian Indonesia seperti cerah, hangat, konstruktif, dan semangat Indonesia Incoperated. Memberi label kisruh untuk menggambarkan konflik antara buruh dan pengusaha ataupun pemerintah. Menggunakan diksi gangguan bagi investasi untuk mencitra atau menggambarkan dampak konflik pengusaha dan buruh tersebut.

Meski demikian, Lewat bentuk kalimat yang disusun wartawan sebagaian besar kalimat menggunakan kalimat aktif. Susunan kalimat tersebut memposisikan narasumber sebagai subjek yang mendefenisikan suatu peristiwa. Pada teks berita, peneliti menemukan sebagaian besar pengusaha diposisiskan sebagai *subjek* yang mendefenisikan polemik kenaikan upah minimum tahun 2013. Meski ada pendefesian dari narasumber lain, tapi tidak mengurangi pendefenisian dari perspektif pengusaha. Pendefenisian polemik upah minimum ini juga terlihat pada detil peristiwa teks berita yang sebagian besar adalah berasal dari pengusaha, yakni berbagai permasalahan yang dihadapi pengusaha akibat kenaikan upah minimum dan dampak aksi unjuk rasa buruh.

Lewat praktik pemakaian bahasa buruh dapat terlihat sebagai kelompok minoritas di dalam teks, hal ini terlihat dari pemakaian bahasa yang digunakan dalam mencitrakan buruh seperti *kelompok berpenghasilan rendah* dan *upah murah*. Penggunaan diksi seperti *menganggu, lemah, tidak berdaya, bertindak tidak rasional semena-mena, demonstrasi sweeping* dan anarksi semakin memberi citra negatif pada buruh. Bahkan dalam teks berita terdapat diksi *produk siap pakai, anti-investasi, ganjalan bagi investor* dalam mengambarkan citra buruh dalam area perekonomian Indonesia.

Selain lewat kata dan susunan kalimat, foto, ilustrasi dan data sebagai pelengkap juga disajikan untuk menggambarkan polemik kenaikan upah minimum. Dari 7 berita *headline* 6 diantaranya memiliki foto atau ilustrasi dan data terhadap pemberitaan polemik upah minimum tahun 2013. Dua diantaranya menyajikan foto aksi unjuk rasa buruh, dua ilustrasi aksi unjuk rasa buruh yang sangat mencolok yang mampu menarik perhatian pembaca. Kedua foto dan ilustrasi tersebut dapat meningkatkan kesan negatif buruh terhadap polemik kenaikan upah minimum tahun 2013.

B. Kognisi Sosial

Pada kognisi sosial peneliti membahas representasi kognisi sosial dan strategi wartawan dalam dalam membuat, membentuk dan memaknai teks berita polemik kenaikan upah buruh Tahun 2013 lalu. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan wawancara pada Bayu Widagdo (Wakil pemimpin redaksi), Rochmad Fitriana (Wartawan), Roberto Purba (wartawan) dan Linda Silitongga (wartawan) yang berkaitan langsung dengan proses produksi pemberitaan polemik kenaikan upah buruh.

Bayu widagdo bekerja sudah lebih 25 tahun di *SKH Bisnis Indonesia*, Fitriana sudah meliput peristiwa kenaikan upah minimum sejak tahun 2000 dan saat ini menjabat sebagai Asisten Manajer Media Services Harian Bisnis Indonesia sekaligus menjadi Waki Ketua Serikat Pekerja Kerukunan Warga Karyawan (SP-KWK) Tahun 2013-2015 di Bisnis Indonesia. Roberto Purba meliput peristiwa kenaikan upah buruh sejak tahun 2007, sejak pertama kali liputan. Sementara Linda silitongga sudah bekerja di SKH Bisnis Indonesia sejak 1991 dan bertugas di Istana negara.

Pada tahap kognisi sosial, peran yang diemban wartawan merupakan hal penting untuk melihat bagaimana wartawan menciptakan realitas terhadap polemik kenaikan upah minimum tahun 2013. Bekerja sebagai wartawan sekaligus bagian dari serikat pekerja di *SKH Bisnis Indonesia* merupakan peran yang diemban wartawan dalam memahami polemik kenaikan upah minimum tahun 2013. Sebagai wartawan, menyajikan berita polemik kenaikan upah minumum tahun 2013 tidak terlepas dari bagaimana *SKH Bisnis Indonesia* menyikapi polemik kenaikan upah minimum tahun 2013. Proses perencanaaan, kegiatan peliputan, pemilihan narasumber, seleksi fakta dan informasi hingga teknik penulisan segala sesuatunya disiapkan bagi wartawan untuk sesuai dengan gaya, panduan, dan sikap dari "*SKH Bisnis Indonesia*.

Sebagai anggota serikat pekerja sekaligus sebagai wartawan R. Fitriana dan Roberto Purba menilai bahwa adalah wajar bagi buruh menuntut penyesuaian upah mengingat harga kebutuhan hidup semakin meningkat. Pengusaha tidak saja langsung menuruti apa kata buruh. Harus ada penghitungan yang nalar dan jitu. Pemerintah,

secara tidak langsung sebenarnya mendukung kenaikan upah mengingat besarnya desakan buruh pada saat itu.

Dalam hal ini, R. Fitriana dan Roberto purba terlihat memahami bagaimana polemik kenaikan upah minimum tahun 2013 yang lalu. Di sisi lain, keberadaan serikat pekerja KWK Bisnis Indonesia yang tidak berfokus pada ketentuan upah pokok dan kemampuan *SKH Bisnis Indonesia* dalam "menyejahterakan" karyawannya secara umum dapat dikatakan tidak memunculkan konflik antara karyawan dengan pihak *SKH Bisnis Indonesia*. Dengan demikian bagaimana pandangan *SKH Bisnis Indonesia* dalam membangun wacana dominan polemik kenaikan upah minimum tahun 2013 dapat diproduksi wartawan atau diliput wartawan sesuai pandangan *SKH Bisnis Indonesia*.

C. Analisis Sosial

Analisis sosial berkaitan dengan wacana yang berkembang di tengah masyarakat terhadap peristiwa polemik kenaikan upah minimum. Bagaimana polemik upah buruh ini diproduksi dan tersebar di masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan membahas dua hal. Pertama, melihat bagaimana pemberitaan polemik upah buruh ini berkembang dimasyarakat melalui media massa lainnya. Selanjutnya, peneliti akan membandingkan dan menghubungkan wacana yang berkembang di masyarakat dengan kognisi yang ada pada wartawan *SKH Bisnis Indonesia*.

Pada polemik kenaikan upah minumum tahun 2013 ini, berita yang ditampilkan televisi lebih banyak memuat mengenai aksi unjuk rasa buruh hampir di seluruh daerah di Indonesia. Meski ada informasi lain yang mengikuti seperti situasi

perekonomian indonesia, ancaman investor cabut investasi di Indonesia, ancaman pengusaha untuk relokasi atau tutup, keluhan pengusaha akan biaya ekonomi perusahaan yang tinggi, upaya penyelesaian atau dialog antara buruh, pengusaha dan pemerintah yang terpisah tetap saja, kronologis aksi unjuk rasa buruhlah yang paling sering dimunculkan di televisi.

Pada media cetak, penelti sebagian koran menampilkan peristiwa aksi unjuk rasa buruh menutuntut upah, sikap pengusah dan mengkritisi kebijakan pemerintah terhadap polemik kenaikan minimum tahun 2013 disertai dengan data, foto, dan ilustrasi yang menarik. Namun pemberitaan mengenai situasi perekonomian di Indonesia, termasuk investasi juga ikut menghiasi pemberitaan mengenai polemik kenaikan upah minimum tahun 2013. Sementara itu, peneliti agak kesulitan menemukan buku-buku yang secara khusus membahas mengenai pengupahan atau upah minimum. Peneliti mengamati bahwa buku-buku yang membahas mengenai serikat pekerja, gerakan perlawanan buruh, jaminan kesehatan, dan buku ketenagakerjaan lebih banyak dipublikasikan dibandingkan buku-buku yang secara khusus membahas pengupahan.

Wacana yang berkembang menurut van Dijk di pengaruhi oleh akses dan kekuasaan yang ada. Pengusaha memiliki kuasa sekaligus akses atas media dibandingkan buruh. Hal ini bisa dilihat dari segi informasi misalnya, permasalahan yang dihadapi pengusaha terhadap kenaikan upah minimum tahun 2013 lebih banyak diberitakan dibandingkan dengan permasalahan yang dihadapi buruh jika upah tidak dinaikkan. Atau fokus pemberitaan lebih kepada kenaikan biaya produksi, kerugian

pengusaha dibandingkan alasan-alasan buruh menuntut kenaikan upah minimum tahun 2013. Hal ini secara tidak langsung tampak bahwa pengusaha memiliki akses yang lebih besar ke media dalam memberi dan mengontrol informasi dibandingkan buruh.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis peneliti menyimpulkan bahwa wacana dominan yang diangkat *SKH Bisnis Indonesia* terhadap polemik kenaikan upah minimum tahun 2013 berupa adanya konflik antara pengusaha dan buruh dalam menentukan besaran upah minimum berdampak pada situasi perekonomian Indonesia, terutama pada tingkat daya saing investasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan hampir seluruh teks berita *headline* edisi November 2012 *SKH Bisnis Indonesia* yang memberitakan polemik kenaikan upah minimum tahun 2013 dihubungkan dengan situasi perekonomian Indonesia saat itu, terutama pada iklim investasi.

Lewat penggunaan diksi cerah, hangat, konstruktif, dan semangat Indonesia Incoperated melegimitasi situasi perekonomian Indonesia. lewat pemakaian kata kekisruhan, ganjalan bagi investor, gangguan bagi iklim investasi melegimitasi bahwa konflik pengusaha dan buruh merupakan situasi yang berdampak negatif "mengganggu" situasi perekonomian. Selain itu, lewat penggunaan diksi, aksi unjuk rasa diberi kesan negatif seperti anarkis dan menggangu kepentingan publik, pengusaha sebagai korban akibat aksi unjuk rasa buruh, sementara pemerintah diminta agar lebih bijaksana. Citra yang ditampilkan media tersebut secara tidak langsung melegimitasi bahwa buruh selalu berunjuk rasa dengan anarkis, pengusaha

mengalami kerugian, aktivitas masyarakat tergangu dan pemerintah dinilai selalu tidak tegas terhadap persoalan hubungan industrial antara buruh dan pengusaha.

Lewat praktik pemakaian bahasa, ada praktik kekuasaan yang terlibat atas wacana polemik kenaikan upah minimum tahun 2013. Pengusaha sebagai kelompok dominan mampu mengontrol informasi lewat akses dan kuasa yang dimilikinya pada media, sedangkan buruh terlihat sebagai kelompok minoritas,. Buruh tidak memiliki akses dan kuasa atas media. Sedangkan media, terutama *SKH Bisnis Indonesia* memiliki kuasa untuk mengontrol, memapankan dan melegimitasi wacana polemik kenaikan upah minimum tahun 2013. Hal ini dapat dilihat dari kepentingan yang dibawa *SKH Bisnis Indonesia* baik dari sikap atau pandangannya terhadap polemik kenaikan upah minimum ataupun dari pembacanya yang merupakan pelanggan dan berstatus pelaku ekonomi. Sementara itu, pada tahap kognisi sosial wartawan, Proses perencanaaan, kegiatan peliputan, pemilihan narasumber, seleksi fakta dan informasi hingga teknik penulisan segala sesuatunya disiapkan bagi wartawan untuk sesuai dengan gaya, panduan, dan sikap dari "*SKH Bisnis Indonesia*.

Secara umum pemberitaan polemik kenaikan upah buruh di media massa selain *SKH Bisnis Indonesia* juga lebih banyak didominasi pengusaha dibandingkan buruh. Hal ini juga dapat menggambarkan pengusaha lebih memiliki akses dan kuasa dibandingkan buruh dalam mengontrol informasi polemik kenaikan upah minimum tahun 2013 ini. Sehingga peristiwa yang kerap kali muncul dimedia terhadap polemik kenaikan upah minimum tahun 2013 ialah dampak negatif yang berakibat pada situasi

perekonomian Indonesia, yang secara tidak langsung berdampak juga pada pelaku pengusaha di Indonesia.

5. Daftar Pustaka

Eriyanto. 2001. Analisis wacana: Pengantar analisis Teks Media. Yogyakarta: Lkis

Rusli, Hardijan. 2004. *Hukum Ketenagakerjaan: Berdasarkan UU No.13/2003*tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya. Bogor: Penerbit
Ghalia Indonesia

Sumarsono, Sonny. 2003. Ekonomi: manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan. Yogyakarya: Graha Ilmu

Dewi Wijayanti, Noviana. 2011. Media Cetak dan Pemberitaan Bencana Letusan Gunung Merapi: Analisis Wacana Pemberitaan Bencana Letusan Gunung Merapi Pada Headline Surat Kabar Kedaulatan Rakyat periode 27 Oktober 2010 sampai 26 november 2010). Universitas Atmajaya Yogyakarta

Krisnawati, Veronika Tyas. 2012. Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi DIY Bagi Pekerja Waktu Tertentu di PT Anindya Mitra Internasional. Universitas Atmajaya Yogyakarta

SKH Bisnis Indonesia, edisi 22 November 2012.

http://www.bisnis.com/big-media/profile.html diakses pada tanggal 3 Oktober 2014
http://www.solopos.com/2014/02/08/indonesia-print-media-award-bisnis-indonesia-solopos-harian-jogja-borong-penghargaan-ipma-2014-488113 diakses pada tanggal 3 oktober 2014